

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Sehubungan dengan

ketentuan tersebut, maka disusunlah LKj Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membangun Negara dan bangsa sendiri, dalam rangka hal tersebut diperlukan Akuntabilitas di setiap instansi Pemerintahan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan di dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggaraan Negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum

dalam perencanaan strategik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja; penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem AKIP merupakan suatu proses hidup yang memerlukan peninjauan dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik masa kini maupun masa mendatang.

Keluaran utama dari sistem Akuntabilitas kinerja adalah laporan Kinerja. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik (*Feed back*) bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan Akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (*historical*), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, khususnya sebagai upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang, terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk laporan Kinerja (LKj) Kesbangpol.

1.2. Tujuan dan Manfaat

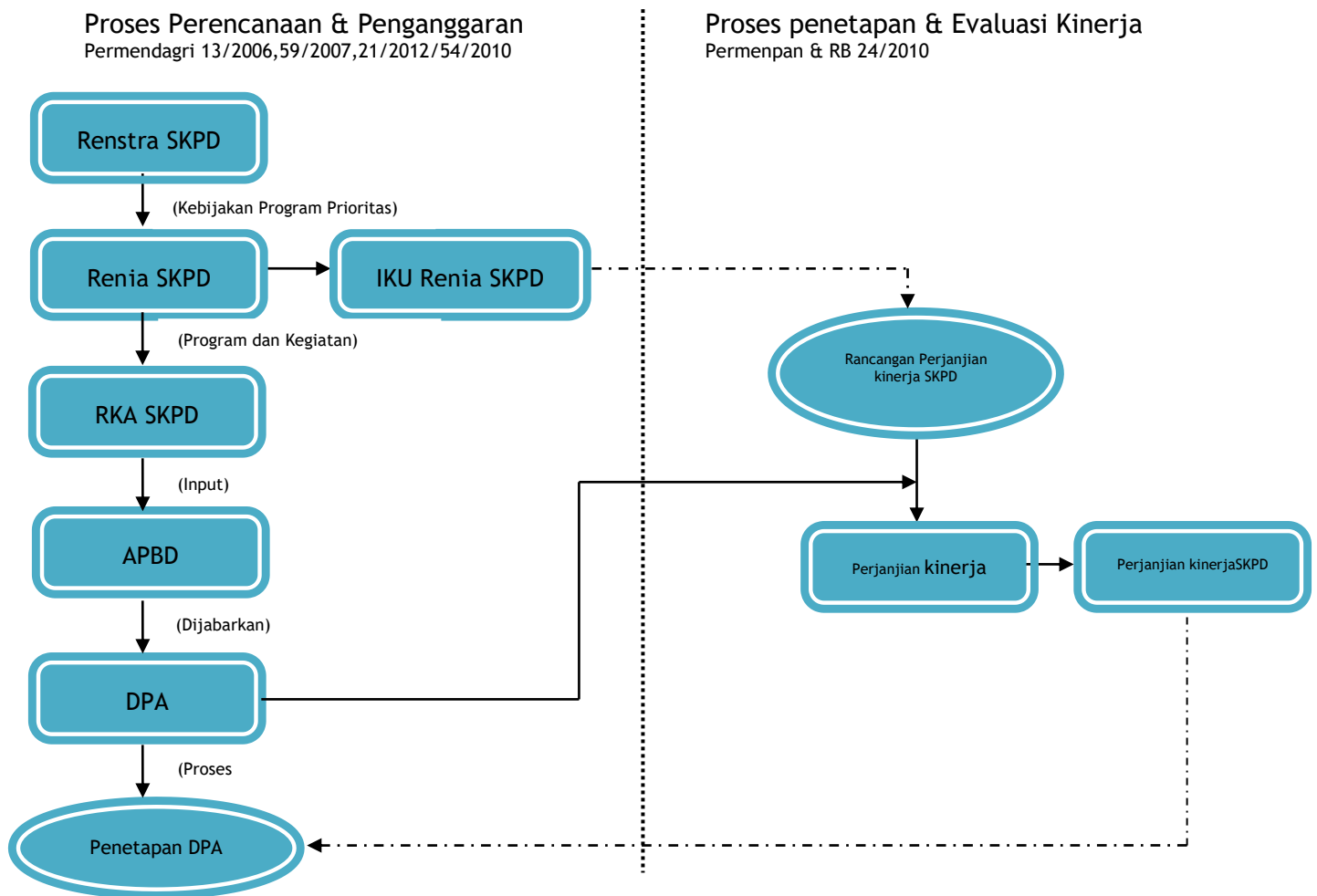
Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi, khususnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai penyajian data realisasi, baik data mengenai target maupun realisasi kinerja.

Evaluasi kinerja mandiri dan analisis yang diuraikan pada LKj ini akan diarahkan pada evaluasi dan analisis terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pengukuran Kinerja ini sangat penting untuk melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh.

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Gambar 1.1 Jadwal Proses Perencanaan, Penganggaran dan LKJ

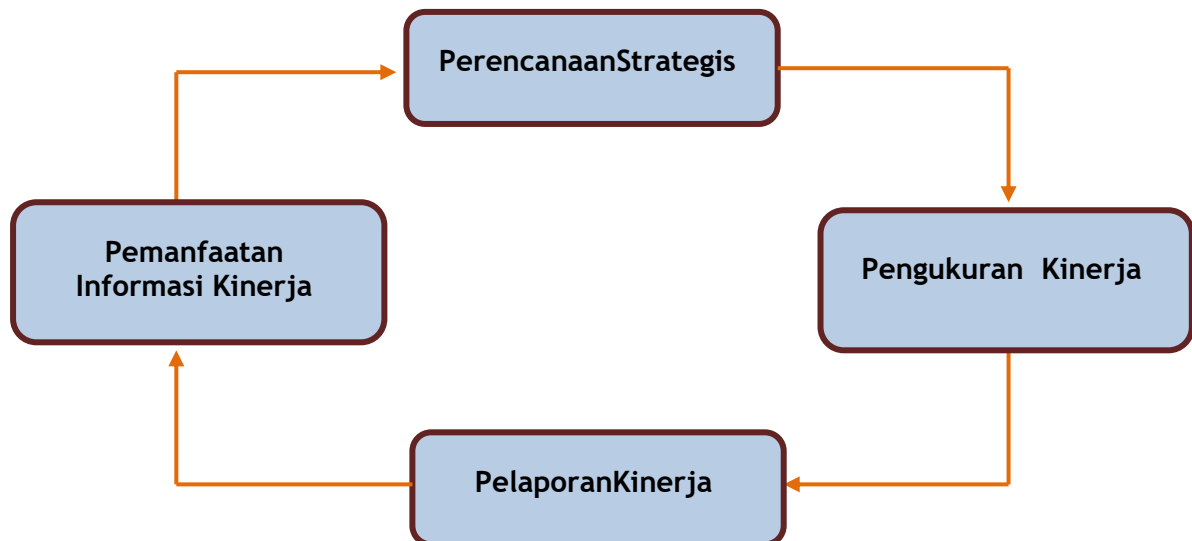


Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan tatanan instrumen dan metode pertanggung jawaban yang intinya meliputi tahapan :

1. Penetapan Perencanaan Strategik
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan informasikinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Siklus laporan kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Siklus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dari Skema gambar diatas, dijelaskan tujuan dan Manfaat penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** merupakan aspek bagi keperluan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKj Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2021 dan mendorong Instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang transparan dengan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh visi, misi, dan tujuan/sasaran strategik yang telah dicapai.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** merupakan aspek bagi keperluan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang menjadikan LKj Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi upaya-upaya perbaikan di masa datang dan merumuskan pemecahan

masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Struktur Organisasi

Sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Yaitu :

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Partisipasi Politik.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
- e. Bidang Penanganan Konflik.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi. Untuk dapat melaksanakan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
 - d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan Badan Kesbangpol;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2 Sub Bagian Keuangan.

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
 - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengsistimasi data dan penyusun rencana serta program kerja;
 - b. Menganalisa data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
 - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Bidang Partisipasi Politik

- (1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;

- d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
- f. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

- (1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
 - c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa. Meningkatkan kesadaran bela negara, serta resapan ideologi negara dikalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
 - c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;
- c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2 Sub Bidang Bela Negara

(1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan.

(1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
- b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan kemasyarakatan;
- c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
- f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
 - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
 - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;

- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;

- c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
- d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
- e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;
 - c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

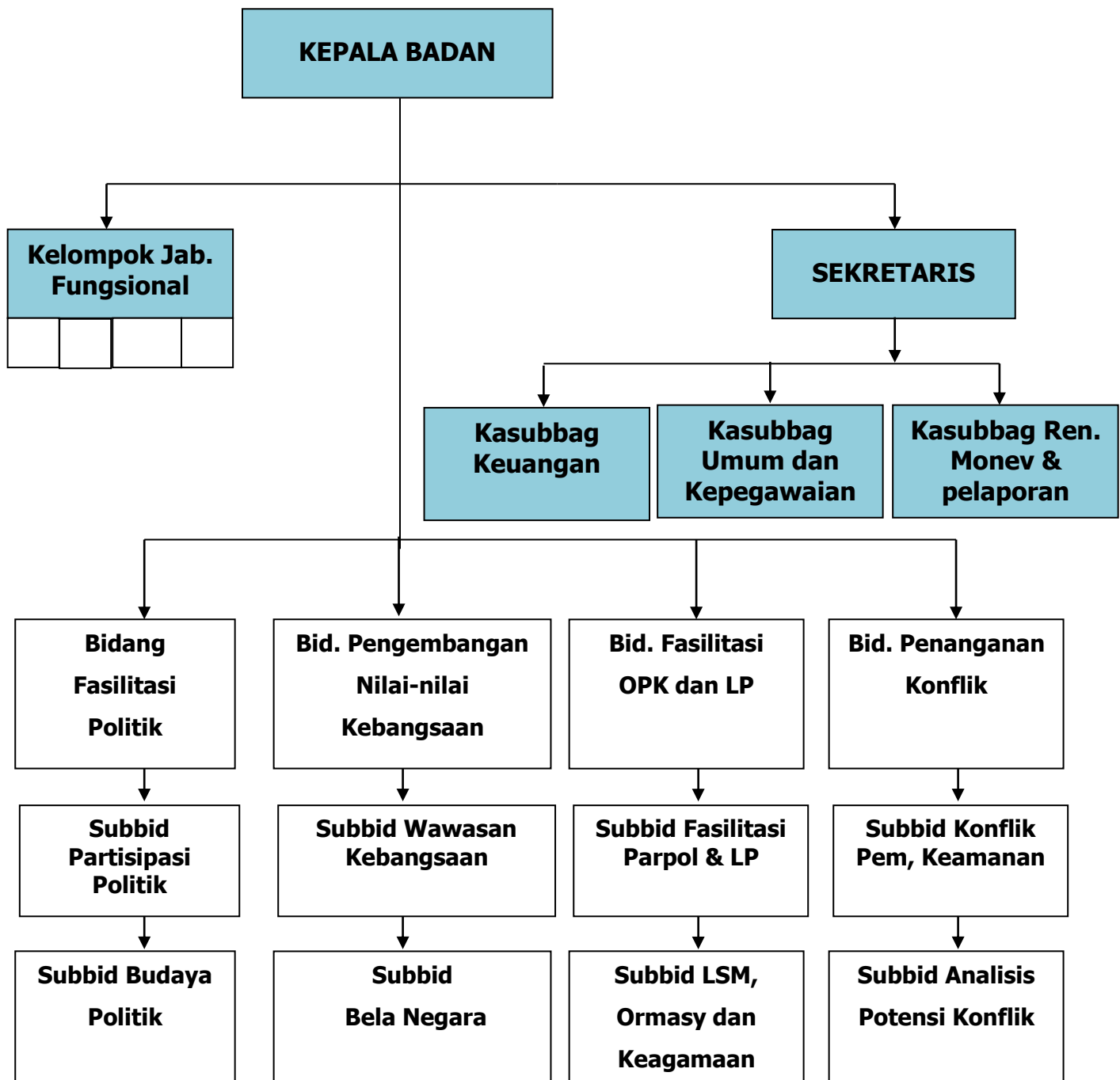
5.2 Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Gambar 1.3

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



1.6. Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak (tujuh puluh tiga) orang. 51 (enam puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27 (dua belas) orang tenaga honorer, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang.
2. Staf/Pelaksana 34 Orang.
3. Tenaga Honorer 15 Orang.

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

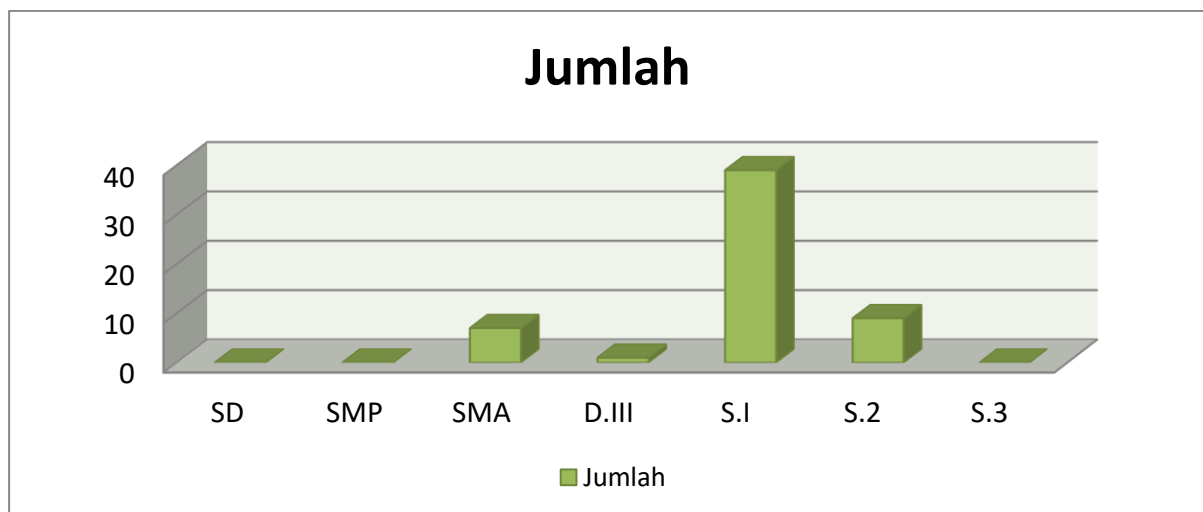
1. Eselon I = - Orang
2. Eselon II = 1 Orang
3. Eselon III = 5 Orang
4. Eselon IV = 11 Orang
5. Non Eselon = 34 Orang

Tabel 1.1
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	SD	-	-	-
2	S L T P	-	-	-
3	S L T A	5 Orang	6,6 %	PNS Daerah
4	D.III	1 Orang	1,64 %	PNS Daerah
5	S.I	45 Orang	73,77 %	PNS Daerah
6	S.II	9 Orang	18,03%	PNS Daerah
7	S.III	-	-	-
	Jumlah	51 Orang		

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol 73,77% pegawai sudah berpendidikan sarjana (S1), bahkan 18,03% lulusan Pasca Sarjana (S2) dan 1,64% Diploma, namun sebanyak 6,6% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.4
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Tingkat Pendidikan

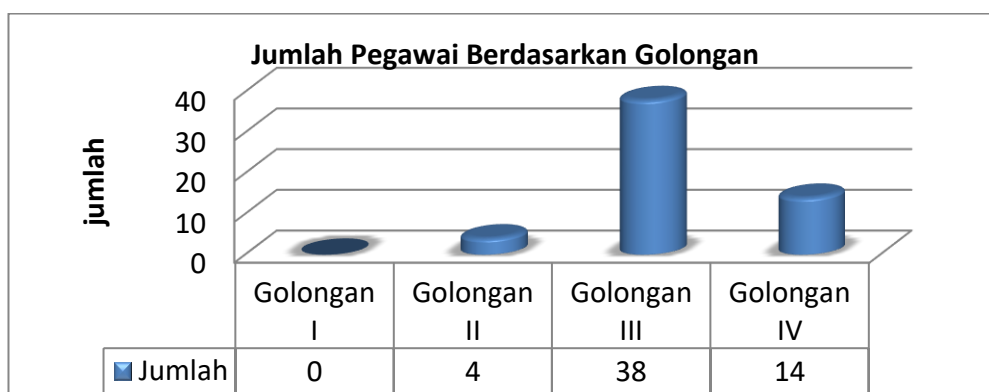


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.2
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Menurut Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	I.c	-	-	-
4	I.d	-	-	-
5	II.a	-	-	-
6	II.b	1 Orang	1,64 %	PNS Daerah
7	II.c	-	-	-
8	II.d	3 Orang	4,92 %	PNS Daerah
9	III.a	4 Orang	8,20 %	PNS Daerah
10	III.b	10 Orang	13,11 %	PNS Daerah
11	III.c	10 Orang	19,61%	PNS Daerah
12	III.d	8 Orang	27,87 %	PNS Daerah
13	IV.a	4 Orang	6,56%	PNS Daerah
14	IV.b	10 Orang	18,03%	PNS Daerah
15	IV.c	1 Orang	1,60%	PNS Daerah
16	IV.d	-	-	-
17	IV.e	-	-	-
	Jumlah	51 Orang	-	-

Gambar 1.5
Posisi Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Berdasarkan Golongan Ruang



1.7 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Iklimpolitik Nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme yang berimbas ke Provinsi Jambi.
2. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.
3. Urusan Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Bangsa Wilayah Provinsi Jambi terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Provinsi Jambi.
4. Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di daerah, masih banyak potensi konflik yang terjadi di Jambi khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada. Sebagai institusi yang bertugas mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah, Badan Kesbangpol perlu meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Jambi. Selain itu, perlu koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda dan Tim Kominda Jambi untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5. Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.

Persoalan tersebut diantaranya:

- a. Terdapat beberapa keraguan sebagian pemerintah daerah dalam memposisikan status Kelembagaan Kesbangpol, mengingat ketidakjelasan struktur dan tugas fungsi Kesbangpol di daerah pasca restrukturisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- b. Ketidakjelasan status Kelembagaan Kesbangpol di daerah apakah perangkat daerah atau bukan, mengingat berdasarkan Pasal 122 merupakan Perangkat Daerah sementara berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tidak ada lagi urusan kesatuan bangsa dan politik.

1.8 Sistematika Penyusunan LKj Tahun 2021

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan berdasarkan data hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021, dan sesuai dengan Selain itu laporan ini bersumber dari pembiayaan yang bersifat Strategik yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sementara itu dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tetapi tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*PerformancePlan*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja (*PerformanceGap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas gambaran tentang latar belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Kesbangpol Provinsi Jambi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA, Menjelaskan Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021, penyajian tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Perbedaan antara target kinerja pada renja tahun 2021 dengan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selama Tahun 2021 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut serta menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

BAB IV – PENUTUP, Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021 atas capaian kinerjanya serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik, perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi dan misi serta mempertahankan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategik yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran. Program dan Kegiatan disusun secara sistimatis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan dan politik Provinsi jambi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, inofatif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui program dan kegiatan.

2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan suatu pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai di masadepan suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya, tetap konsisten dan eksis, antisipasif, inovatif dan produktif untuk menujucita dan citra yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan cita dan citra tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

Visi :

"Terwujudnya kondisi Politik Daerah, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas"

Visi diatas mengandung semangat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menciptakan keadaan dan kondisi yang lebih baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi merupakan sesuatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan, diemban atau dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil melaksanakan program-programnya dengan baik. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan

Misi :

1. Meningkatkan Sistim Politik Daerah yang berbasis Etika dan Budaya Politik.
2. Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa yang Demokratis dan Dinamis.
3. Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.
4. Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari ke empat misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahunan.

Dalam rangka pengembangan misi guna mencapai visi yang telah dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan **4 Tujuan** dari misi diatas adalah :

1. Mewujudkan situasi politik daerah yang kondusif.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang dinamis.
3. Mewujudkan peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terciptanya situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Untuk mendukung tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya situasi politik daerah yang kondusif.
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis.
3. Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.
4. Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

2.3 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang serta dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang akan ditempuh dalam pelaksanaan Visi Misi Badan kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 4 Kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan peran masyarakat melalui pendidikan politik.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.
Pembinaan dan Fasilitasi Ormas, OKP, LSM, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat yang kondusif.

2.4 Program/Kegiatan dan Sasaran yang ingin dicapai

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan target capaian kinerja dari instansi pemerintah yang maksimal baik kerjasama dengan masyarakat maupun Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Visi dan Misi yang diinginkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai 9 program dengan 35 kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

Sasarannya tersedianya kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan rutin serta Kebutuhan operasional dalam tugas sehari-hari.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

Sasarannya tersedianya dan Terpeliharanya Mobilitas, Sarana dan Prasarana Apratur.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur.

Sasarannya tersedianya sarana kelengkapan dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas.

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sasarannya meningkatnya ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilan aparatur.

5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasarannya tercapainya :

- (a.). Perencanaan program dan kegiatan yang serasi sehingga terhimpunnya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik, lengkap dan akurat.
- (b.). Tersinkronnya program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Provinsi Jambi dan Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di Provinsi Jambi.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran yang akan dicapai pada program ini antara lain :

- (a.). Terciptanya Kerukunan antar etnis dan suku di kalangan masyarakat di Provinsi Jambi.
- (c.). Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- (e.). Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jambi.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

- (a.). Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat melalui kegiatan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
- (b.). Terakomodirnya izin rekomendasi penelitian di kalangan mahasiswa dan peneliti asing.
- (c.). Terasilitasinya penanganan konflik sosial melalui kegiatan Tim Terpadu (TIMDU) di Provinsi jambi.
- (d.). Terpantaunya kegiatan orang asing, lsm asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi.
- (e.). Terpetanya potensi konflik di provinsi jambi melalui kegiatan pemantau dan pemetaan potensi konflik.
- (f.). Tersosialisasinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan generasi muda, melalui kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba di Provinsi jambi.

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini antara lain :

- a) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran berpolitik, memilih pemula dan Gender melalui kegiatan forum diskusi politik.
- b) Terlaksananya Rakor Perkembangan dan monitoring Perkembangan pelaksanaan Pemilu di Daerah Provinsi jambi.

9. Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh.

Sasaran yang dicapai pada program ini adalah :

- (a). Tersalurkannya bantuan partai politik kepada Parpol pemenang pemilu melalui Tim Verifikator.
- (b). Monitoring keberadaan eksistensi dan penyelesaian permasalahan parpol ormas, LSM, OKP dan lembaga keagamaan dalam Provinsi Jambi.
- (c). Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk memelihara kesatuan bangsa dalam bidang ideologi, politik ekonomi dan sosial budaya.
- (d). Meningkatkan peran serta Ormas dalam pembangunan di Daerah melalui kegiatan Kerjasama bidang kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi.

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program/kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jambi telah menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	Persentase partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	67,99 %
2.	Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis.	Indeks Kebebasan Sipil	69,76 %
3.	Meningkatnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam	- Persentase Ormas Aktif - Persentase Peran Politik	48,22 % 489%

	pembangunan daerah	Perempuan	
4.	Meningkanya situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif	- Persentase jumlah potensi konflik yang difasilitasi - Persentase RAD penanganan konflik sosial	50 % 40 %
5.	Meningkatnya pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan	- Persentase pelayanan - Indeks Ke[uasan Masyarakat	90 % 1 Tahun

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 9.254.340.055	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 490.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 921.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.707.737.400	APBD
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 536.000.080	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.989.800.000	APBD
Jumlah		Rp. 19.275.341.535	APBD

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN

Dr. H. FAHRORI UMAR, M. Hum

H. Mukti, SE, ME
Pembina UtamaTingkat I
NIP. 19701112 199903 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode-metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi menunjukkan kinerja yang baik, persen capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{2 \times (\text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran mengacu pada peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

3.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BanKesbangpol) Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan

data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 < 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 < 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 < 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 < 65	Rendah	Kuning Muda
5	< 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh badan kesatuan Bangsa dan politik (BanKesbangpol) provinsi Jambi yang dilakukan dengan membandingkan antara target efektivitas penyelenggaraan program kegiatan, evaluasi kinerja tahun 2020. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BanKesbangpol) Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja BanKesbangpol
Provinsi Jambi 2018, 2019, 2020

No	Indikator	Capaian		Capaian 2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	71,16	87,69	69,01 %	Dalam Proses	Dalam Proses
2	Indeks Kebebasan Dari Diskriminasi	93,47	93,47	83,95 %	Dalam Proses	Dalam Proses
3	Nilai Rencana Aksi (RAD) Penanganan Konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	-

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Realisasi dan target kinerja badan kesatuan Bangsa dan Politik (BanKesbangpol) Provinsi Jambi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi dan target pencapaian pada tahun 2019 maka terlihat bahwa kinerja BanKesbangpol cenderung stabil. Sedangkan untuk realisasi dan target pencapaian pada tahun 2021 sedang dalam proses. Gambaran capaian kinerja BanKesbangpol tahun 2021 dengan revisi pada indikator pencapaian sebagaimana gambaran tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian kinerja BanKesbangpol Provinsi Jambi
Tahun 2021

No	Sasaran Strategi	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Aspek Hak-Hak Politik	73,75 %	Dalam Proses	Dalam Proses
2	Program Perwujudan Demokrasi	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	97,45 %	Dalam Proses	Dalam Proses
3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Nilai Rencana Aksi (RAD) Penanganan Konflik	Sangat baik	Dalam Proses	Dalam Proses

Tabel diatas menggambarkan bahwa pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BanKesbangpol) Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2020 sangat tinggi, dan untuk tahun 2021 masih dalam proses.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Indikator	Awal RPJMD 2016	Capaian			Target 2021	Capaian s/d 2021 terhadap target 2021 (%)
			2019	2020	2021		
1	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	54,01	71,16	87,69	Dalam Proses	73,75	Dalam Proses
2	Indeks Kebebasan Dari Diskriminasi	84,95	93,47	93,47	Dalam Proses	97,45	Dalam Proses
3	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian vvisi dan misi

pelaksanaan Renstra Bankesbangpol Provinsi Jambi Periode Renstra 2016-2021 dapat dilihat pada uraian berikut :

Tujuan : Guna mewujudkan misi RPJMD Jambi yaitu Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, Bankesbangpol Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah tujuan yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang Bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas" melalui tujuan tersebut diharapkan tersedianya dokumen perencanaan daerah yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah yang memberikan dampak terhadap stabilitas makroekonomi.

3.4 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas Pokok "*Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik*" sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Partisipasi Politik, Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok diatas, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam

upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Dalam rangka pencapaian kinerja, Badan Kesbangpol Provinsi Jambi mengacu pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 yang merupakan turunan dari RPJMD Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dimana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

“Memantapkan Kualitas Sumber daya Manusia”

yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Dari hal tersebut, sasaran yang ingin di capai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengacu pada sasaran Renstra adalah :

1. Meningkatnya situasi politik daerah yang Kondusif dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
2. Meningkatnya kehidupan Demokrasi yang dinamis dan Pengendalian Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program kegiatan dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026, telah disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran, selain itu juga dapat dijelaskan program-program, target, dan rencana pendanaan Badan Kesbangpol yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 Menuju Jambi MANTAP, dalam Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.5

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Visi : Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Mengembangkan Fungsi dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan	Revitalisasi FKUB sehingga Dapat Menjadi Lembaga yang Optimal Bagi Para Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemerintah.

Tabel 3.6

**Rencana Program dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
Yang Mengacu Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

No	Jenis urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)	Capaian Kinerja awal RPJMD (2021)	Rencana Program dan Pendanaan														SKPD PENANG GUNG JAWAB
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Aspek indeks kebebasan berkeyakinan	76,67%	80,47%	254	84,27%	260,0	88,07%	270,0	91,87%	280,0	95,67%	290,0	99,47%	300,0	99,47%	1654	Badan Kesbangpol
		Aspek indeks kebebasan dari diskriminasi	96,70%	96,70%	1.120	97,80%	1.188,0	98,35%	1.255,0	99,45%	1.325,0	99,45%	1.395,0	100%	1.465,0	100%	7.748	
2.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Nilai RAD penanganan Konflik Sosial	Sangat baik	Sangat baik	709	SangatBaik	810,0	Sangat Baik	870,0	Sangat Baik	930,0	Sangat Baik	980,0	Sangat Baik	1.040,6	Sangat Baik	5.339 ,286	Badan Kesbangpol
		Persentase potensi konflik sosial yang difasilitasi	97%	97%	361	98%	632,0	98,5%	667,0	99%	702,0	99,5%	737,0	100%	772,0	100%	3.871 ,41	
		Penyelesaian penanganan Konflik Suku Anak Dalam (Konflik)	1	1	350	2	500,0	3	650,0	4	800,0	5	900,0	6	150,0	6	4.250	
3.	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	66,43%	66,43%	807	67,02%	846,6	68,40%	886,6	69,02%	926,6	69,90%	966,6	70,50%	1.066,0	70,50%	5.499	Badan Kesbangpol
4.	Program perwujudan demokrasi makin kokoh	Persentase Ormas Aktif dalam Pelaksanaan pembangunan	31%	31%	2.765	43%	3.191,5	55%	3.510,7	79%	3.861,7	91%	4.247,9	100%	4.672,7	100%	22249,426	Badan Kesbangpol
		Persentase peningkatan peran politik perempuan	0%	24%	-	24%	150,0	40%	165,0	72%	181,5	88%	199,7	100%	219,6	100%	915,765	

3.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks aspek hak-hak politik	54,01	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75	73,75 %
2.	Indeks aspek kebebasan sipil	84,95	87,95	87,95	92,45	94,95	97,45	97,45	99,47 %
3.	Indeks institusi demokrasi	74,34	78,54	78,54	86,94	91,14	95,34	95,34	100 %
4.	Nilai rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2021-2026, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, tertuang dalam Rencana Pembangunan tahap ke III RPJMD (2021-2026) dalam tahap ini Renstra Kesbangpol menempatkan fokus pada :

- a) Upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama serta peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat masih merupakan prioritas pembangunan bidang keagamaan pada periode ini :
 1. Dalam konteks mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda tersebut.
 2. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan. Pengamalan agama pada tahap ini diharapkan tidak hanya meningkat pada tataran kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- b) Prioritas pembangunan bidang politik pada tahap ini adalah pada pemantapan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pemantapan hubungan

eksekutif dan legislatif, serta terimplementasikannya rencana induk daerah otonom yang telah disusun pada periode sebelumnya.

- c) Pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hubungan Renstra SKPD Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi, Dengan demikian dapat terjalin keserasian dan kesinambungan perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, tertib, aman dan damai untuk menuju JAMBI MANTAP 2021-2026 Badan Kesbangpol telah menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA BanKesbangpol Provinsi Jambi guna mendukung kinerja setiap Program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yang dapat dilihat dari tabel RENSTRA berikut ini :

Tabel 3.8
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				18.351.850.000		20.317.850.000		23.304.100.000		23.378.600.000		25.680.000.000		36.845.681.653	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8.01	BADAN KESBANGPOL PRO. JAMBI				18.351.850.000		20.317.850.000		23.304.100.000		23.378.600.000		25.680.000.000		36.845.681.653	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas	Meningkatnya persentase pelayanan Administrasi Perkantoran		8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Predikat SAKIP	79 (BB)	80	10.563.350.000	82	11.679.350.000	84	11.791.600.000	84	10.998.600.000	85	12.390.000.000	85	11.427.500.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi Program dan Rencana Kerja Aparatur Badan Kesbang dan Politik	Terlaksananya Rencana kerja dan terhimpun/ tersusun dengan baik, lengkap, akurat untuk dapat menjadi laporan		8 01 01 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya program Kegiatan dan Renja Badan Kesbangpol	90 %	95 %	285.000.000	95%	308.000.000	95%	350.000.000	95%	380.000.000	95%	405.000.000	95%	405.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12 Dok	80.000.000	12 Dok	80.000.000	12 Dok	100.000.000	14 Dok	110.000.000	14 Dok	125.000.000	75 Dok	125.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja	Terlaksananya Komunikasi dan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	1 Th	1 Th	180.000.000	1 Th	200.000.000	1 Th	220.000.000	1 Th	235.000.000	1 Th	240.000.000	1 Th	240.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Peraangkat Daerah	Terlaksananya tugas pokok perangkat daerah	1 Th	1 Th	25.000.000	1 Th	28.000.000	1 Th	30.000.000	1 Th	35.000.000	1 Th	40.000.000	1 Th	40.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	100%	8.760.000.000	100%	8.775.000.000	100%	8.775.000.000	100%	8.790.000.000	100%	9.050.000.000	100%	9.050.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.02 03	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Prov Jambi	14 Bulan	14 Bulan	8.500.000	14 Bulan	8.500.000	14 Bulan	8.500.000	14 Bulan	8.500.000	14 Bulan	8.750.000	14 Bulan	8.750.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
	Terdukungnya		8 01 01 1.02	Pelaksanaan	Tersusunya	12 Bulan	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	Badan	Prov

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	biaya jasa pengelola Administrasi Keuangan		03	Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD														Kesbangpol Prov. Jambi	Jambi
			8 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya AdministrasiPerangkat Daerah	100%	100%	73.750.000	100%	76.250.000	100%	82.000.000	100%	87.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Hariang Dinas Pegawai	74 Stel	75 Stel	48.750.000	74 Stel	48.750.000	80 Stel	52.000.000	80 Stel	52.000.000	60 Stel	60.000.000	300 Stel	60.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan pegawai mengikuti Diklat/ kursus	1 Th	1 Th	25.000.000	1 Th	27.500.000	1 Th	30.000.000	1 Th	35.000.000	1 Th	40.000.000	1 Th	40.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	95%	473.000.000	95%	505.400.000	95%	534.600.000	95%	583.600.000	95%	620.000.000	95%	650.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06 01	Penyedia Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor	1 Th	1 Th	27.500.000	1 Th	30.000.000	1 th	32.000.000	1 Th	35.000.000	1 Th	40.000.000	1 Th	40.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kegiatan rapat-rapat	1 Th	1 Th	52.000.000	1 Th	55.000.000	1 Th	55.000.000	1 Th	55.000.000	1 Th	60.000.000	1 Th	60.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terakomodirnya informasi secara akurat	6 Media Cetak	10 Media Cetak	18.500.000	10 Media Cetak	20.400.000	12 Media Cetak	22.600.000	12 Media Cetak	23.600.000	12 Media Cetak	25.000.000	66 Media Cetak	25.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.06 09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdukungnya koordinasi kedalam dan luar daerah	1 Th	1 Th	320.000.000	1 Th	340.000.000	1 Th	360.000.000	1 Th	400.000.000	1 th	420.000.000	1 Th	450.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terakomodir Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	172.000.000	100%	1.160.000.000	100%	1.150.000.000	100%	220.000.000	100%	1.200.000.000	100%	240.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			8 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Mobil dan 12 Motor			1 Mobil dan 2 Motor	500.000.000	1 Mobil dan 2 Motor	500.000.000			1 Mobil dan 2 Motor	500.000.000			Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Mobil			1 Mobil	450.000.000	1 Mobil	450.000.000			1 Mobil	450.000.000			Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	14 unit	20 unit	172.000.000	21 unit	210.000.000	20 unit	200.000.000	22 unit	220.000.000	22 unit	250.000.000	120 unit	240.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	207.500.000	95%	217.500.000	95%	222.000.000	95%	228.000.000	95%	240.000.000	95%	237.500.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
	Lancarnya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lainnya		8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk	1 Th	1 Th	20.500.000	1 Th	20.500.000	1 Th	22.000.000	1 Th	23.000.000	1 Th	25.000.000	1 Th	22.500.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
	Lancar dan terdukungnya fasilitas air, listrik dan telepon		8 01 01 1.08 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Th	1 Th	133.000.000	1 Th	140.000.000	1 Th	140.000.000	1 th	140.000.000	1 Th	145.000.000	1 Th	145.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	1 Th	1 Th	54.000.000	1 Th	57.000.000	1 Th	60.000.000	1 Th	65.000.000	1 Th	70.000.000	1 Th	70.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	592.100.000	100%	637.200.000	100%	678.000.000	100%	710.000.000	100%	775.000.000	100%	745.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 Th	1 Th	295.000.000	1 Th	300.000.000	1 Th	310.000.000	1 Th	320.000.000	1 Th	350.000.000	1 Th	320.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Operasional atau Lapangan																
			8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja	1 Th	1 Th	87.100.000	1 Th	87.200.000	1 Th	88.000.000	1 Th	90.000.000	1 Th	100.000.000	1 Th	100.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	325.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
Meningkatkan pengetahuan pengembangan tokoh agama, berwawasan serta kesadaran berbangsa dan bertanah air	Tokoh masyarakat tokoh agama, Aparatur Pemerintah dan Pemuda		8 01 02	PROGRAM DAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		78%	1.055.000.000	79%	1.200.000.000	80%	1.445.000.000	81%	1.620.000.000	83%	1.725.000.000	85%	3.382.366.833	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI		76%	1.055.000.000	79%	1.200.000.000	80%	1.445.000.000	81%	1.620.000.000	83%	1.725.000.000	85%	3.382.366.833	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 02 1.01 01	Penyusuna Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya teknis Program dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 Prog Kerja	5 Prog Kerja	60.000.000	5 Prog Kerja	60.000.000	6 Prog Kerja	250.000.000	6 Prog Kerja	350.000.000	7 Prog Kerja	375.000.000	7 Prog Kerja	375.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi nWawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter, Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pengutasan Pendidikan bagitenaga pendidik dan tokoh Masyarakat	3 Dok	3 Dok	80.000.000	3 Dok	80.000.000	4 Dok	250.000.000	4 Dok	250.000.000	4 Dok	250.000.000	5 Dok	250.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Terlaksananya Demokrasri	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	-	4 Kab/Kota	-	4 Kab/Kota	230.000.000	8 Kab/Kota	250.000.000	11 Kab/Kota	280.000.000	11	280.000.000	Badan Kesbangpol Prov.	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dengan Baik di Provinsi Jambi												Kab/ Kota		Jambi	
			8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	200 Peserta	210 Peserta	565.000.000	300 Peserta	565.000.000	330 Peserta	350.000.000	400 Peserta	400.000.000	420 Peserta	420.000.000	1.650 Peserta	2.077.368.833	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan FPK Kab/Kota yang Sudah Terbentuk di Provinsi Jambi	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	350.000.000	9 Kab/Kota	350.000.000	9 Kab/Kota	365.000.000	10 Kab/Kota	370.000.000	11 Kab/Kota	400.000.000	11 Kab/Kota	400.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		77%	2.970.000.000	79%	3.200.000.000	81%	4.450.000.000	83%	4.500.000.000	85%	4.540.000.000	85%	4.525.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Terlaksana Kebijakan- Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,		77%	2.970.000.000	79%	3.200.000.000	81%	4.450.000.000	83%	4.500.000.000	85%	4.540.000.000	85%	4.525.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Politik	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
			8 01 03 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	6 Prog Kerja	6 Prog Kerja	-	6 Prog Kerja	200.000.000	6 Prog Kerja	225.000.000	6 Prog Kerja	225.000.000	6 Prog Kerja	235.000.000	6 Prog Kerja	235.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 03 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Dokumentasi Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik serta Budaya Politik	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	200.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	11 Kab/Kota	225.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Terealisasinya Bantuan Partai	11 Parpol	11 Parpol	2.500.000.000	11 Parpol	2.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	11 Parpol	3.500.000.000	Badan Kesbangpol Prov.	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik yang Memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi														Jambi	
			8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Rakor Bidang Politik 2021 dan Terpantaunya Situasi Politik Daerah di Provinsi Jambi Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik	72 Peserta	80 Peserta	315.000.000	85 Peserta	335.000.000	85 Peserta	340.000.000	90 Peserta	350.000.000	100 Peserta	350.000.000	512 Peserta	350.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan Sosialisasi Peraturan Bantuan Parpol di Provinsi Jambi	4 Ka/Kota	6 Kab/Kota	155.000.000	7 Kab/Kota	165.000.000	8 Kab/Kota	185.000.000	9 Kab/Kota	200.000.000	10 Kab/Kota	230.000.000	10 Kab/Kot	215.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Pelaksanaan		90%	1.273.500.000	90%	1.421.000.000	90%	2.065.000.000	90%	2.395.000.000	95%	2.450.000.000	95%	10.092.024.320	Badan Kesbangpol Prov.	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														Jambi	
			8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkannya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		90%	1.273.500.000	90%	1.421.000.000	90%	2.065.000.000	90%	2.395.000.000	95%	2.450.000.000	95%	10.092.024.320	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 04 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Terbentuknya Database Pendataan Ormas, Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah Provinsi Jambi	140 Ormas	168 Ormas	207.000.000	196 Ormas	250.000.000	234 Ormas	320.000.000	280 Ormas	380.000.000	280 Ormas	380.000.000	1.158 Ormas	1.650.728.960	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 04 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	50 SKT	55 SKT	-	60 SKT	-	65 SKT	200.000.000	70 SKT	220.000.000	75 SKT	250.000.000	325 SKT	670.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Terjalinnnya Kerjasama Pemerintah Kesbangpol dalam dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi	18 Ormas	60 Ormas	931.500.000	78 Ormas	1.000.000.000	103 Ormas	1.150.000.000	125 Ormas	1.350.000.000	25 Ormas	1.350.000.000	531 Ormas	6.450.135.200	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Terlaksananya Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	200.000.000	11 Kab/Kota	210.000.000	11 Kab/Kota	230.000.000	11 Kab/Kota	230.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
			8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Termonitornya eksistensi/Keberadaan Serta Permasalahan Ormas, Provinsi	35 Ormas	53 Ormas	135.000.000	63 Ormas	171.000.000	75 Ormas	195.000.000	105 Ormas	235.000.000	105 Ormas	240.000.000	443 Ormas	1.091.160.160	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		85%	680.000.000	90%	840.000.000	92%	1.130.000.000	93%	1.185.000.000	95%	1.300.000.000	95%	4.143.790.500	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Ekososbud, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah		85%	650.000.000	90%	840.000.000	92%	1.130.000.000	93%	1.185.000.000	95%	1.300.000.000	95%	4.143.790.500	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Terbentuknya Database Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Prog Kerja	8 Prog Kerja	110.000.000	8 Prog Kerja	120.000.000	8 Prog Kerja	150.000.000	9 Prog Kerja	180.000.000	10 Rpg Kerja	200.000.000	10 Prog Kerja	170.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan	Terlaksana Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di	8 Dok	9 Dok	-	10 Dok	-	12 Dok	175.000.000	12 Dok	175.000.000	13 Dok	200.000.000	72 Dok	550.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah															
			8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi	12 Dok	12 Dok	482.000.000	15 Dok	500.000.000	17 Dok	540.000.000	18 Dok	560.000.000	20 Dok	600.000.000	94 Dok	3.123.790.500	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas antar Tim Pencegahan Narkotika, Forum KUB dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi	49.323.180	11 Kab/Kota	58.000.000	11 Kab/Kota	70.000.000	11 Kab/Kota	90.000.000	11 Kab/Kota	95.000.000	11 Kab/Kota	100.000.000	11 Kab/Kota	100.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Fasilitas KUB Dan Penghayat Kepercayaan Daerah		11 Kab/Kota	-	11 Kab/Kota	150.000.000	11 Kab/Kota	175.000.000	11 Kab/Kota	175.000.000	11 Kab/Kota	200.000.000	11 Kab/Kota	200.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penangan konflik sosial	1.499.999.980	78%	1.840.000.000	80%	1.977.500.000	83%	2.422.500.000	85%	2.680.000.000	86%	3.275.000.000	88%	3.275.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasionadan penanganan konflik sosial	1.499.999.980	78%	1.840.000.000	80%	1.977.500.000	83%	2.422.500.000	85%	2.680.000.000	86%	3.275.000.000	88%	3.275.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 06 1.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah		6 Prog Kerja	-	6 Prog Kerja	-	7 Prog Kerja	145.000.000	8 Prog Kerja	155.000.000	8 Prog Kerja	200.000.000	8 Prog Kerja	200.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 06 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,		12 Dok	-	12 Dok	-	13 Dok	150.000.000	15 Dok	275.000.000	15 Dok	275.000.000		275.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Serta Penanganan															
			8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah dan Pusat dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah, Pemantauan Orang Asing/TKA, Serta Koordinasi antar Pimpinan Daerah	428.942.580	11 Dok	500.000.000	11 Dok	520.000.000	12 Dok	600.000.000	13 Dok	620.000.000	13 Dok	650.000.000	10 Dok	650.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terkordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	64.266.000	11 Kab/Kota	75.000.000	11 Kab/Kota	82.500.000	11 Kab/Kota	100.000.000	11 Kab/Kota	100.000.000	11 Kab/Kota	115.000.000	11 Kab/Kota	115.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi
			8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	6.791.400	8 Kasus	15.000.000	9 Kasus	25.000.000	11 Kasus	27.500.000	12 Kasus	300.000.000	12 Kasus	35.000.000	12 Kasus	35.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah															
			8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Komunikasi forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jambi	1.000.000.000	Forkopim da Prov. Jambi	1.250.000.000	Forkopim da Prov. Jambi	1.350.000000	Forkopim da Prov. Jambi	1.400.000.000	Forkopim da Prov. Jambi	1.500.000.000	Forkopim da Prov. Jambi	2.000.000.000	Forkopim da Prov. Jambi	2.000.000.000	Badan Kesbangpol Prov. Jambi	Prov Jambi

3.6 Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan memperhatikan Rencana Strategik yang telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun maka, ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam RENSTRA. Perjanjian Kinerja Tahunan ditetapkan setiap tahun dengan berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Gubernur Jambi.

Rencana kinerja Tahun 2021 secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagaimana terlampir dalam daftar Tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya situasi politik daerah yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi pemilukada - Jumlah peserta Rakor Bidang Politik 	210 orang 11 Kab/Kota
2. Meningkatnya kehidupan demokrasi yang dinamis.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta peningkatan rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda - Jumlah peserta penguatan kesadaran berbangsa dan bernegaradengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI - Jumlah peserta pembinaan Etnis dan Suku - Jumlah peserta pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi 	150 orang 80 orang peserta 80 orang 100 Orang
3. Meningkatnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pembinaan kemapanan Partai Politik di Provinsi Jambi - Jumlah peserta keberadaan eksistensi Parpol di Provinsi Jambi - Jumlah peserta eksistensi permasalahan ormas - Jumlah pembinaan ormas 	100 orang 100 orang 575 orang 32 Ormas

<p>4. Meningkatnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga kerja asing (TKA), Peneliti/Tenaga Ahli Asing, Rohaniawan, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi. - Jumlah laporan Penanganan Konflik oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. - Jumlah peserta Koordinasi Pemantauan dan Fasilitasi Pasca Konflik di Provinsi Jambi. - Jumlah laporan Sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi 	<p>11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota</p> <p>11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota</p> <p>60 orang</p> <p>2 Laporan berkala dan Insenditil Gub. dan Mendagri</p>
---	---	---

Jumlah Anggaran :

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. | 9.150.601.066 |
| 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | Rp. | 490.973.385 |
| 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. | 2.494.988.000 |
| 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | Rp. | 597.524.320 |
| 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Rp. | 482.148.590 |
| 6. Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Rp. | 1.264.859.980 |

Jambi, Januari 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19701112 1999 03 1 002

3.7 Laporan Capaian Realisasi Kinerja RENSTRA Tahun 2016-2021 Badan Kesbangpol Provinsi Jambi (Tahun Awal RENSTRA Tahun 2016)

Tabel 3.9

**Capaian RENSTRA Tahun 2016-2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2019		Capaian s/d 31 Des 2021
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya situasi politik daerah yang kodusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi pemilukada - Jumlah peserta Rakor Bidang Politik 	210 orang 11 Kab/Kota	210 orang 11 Kab/Kota	97,98 %
2.	Meningkatnyanya kehidupan demokrasi yang dinamis.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta peningkatan rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda - Jumlah peserta penguatan kesadaran berbangsa dan bernegaradengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI - Jumlah peserta pembinaan Etnis dan Suku - Jumlah peserta pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi 	150 orang 80 orang peserta 80 orang 100 Orang	150 orang 80 orang peserta 80 orang 100 Orang	91,87 %
3.	Meningkatnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pembinaan kemapanan Partai Politik di Provinsi Jambi - Jumlah peserta keberadaan eksistensi Parpol di Provinsi Jambi - Jumlah peserta eksistensi 	100 orang 100 orang 575 orang	100 orang 100 orang 575 orang	99,15

		permasalahan ormas - Jumlah pembinaan ormas	32 Ormas	32 Ormas	
4.	Meningkatnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif	- Jumlah laporan Pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga kerja asing (TKA), Peneliti/Tenaga Ahli Asing, Rohaniawan, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Jambi. - Jumlah laporan Penanganan Konflik oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. - Jumlah peserta Koordinasi Pemantauan dan Fasilitasi Pasca Konflik di Provinsi Jambi. - Jumlah laporan Sosialisasi tentang Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika di Provinsi Jambi	11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota 11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota 60 orang 2 Laporan berkala dan Insenditil Gub. dan Mendagri	11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota 11 laporan berkala & Insenditil 11 Kab/Kota 60 orang 2 Laporan berkala dan Insenditil Gub. dan Mendagri	95,91

3.8 Laporan Hasil kegiatan dan Realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan yang Renstra Tahun 2021-2026, Indikator kinerja tersebut beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya Tahun 2021 dapat diuraikan dibawah ini :

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok

indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategik Renstra Tahun 2021-2026 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya diuraikan dibawah ini :

i. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan adanya hubungan kemitraan dan fasilitasi antara pelajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dimana dalam hubungan kemitraan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam target indikator kinerja. Dana yang menunjang program ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar Rp.490.973.385,-. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,59% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.488.958.091,- dengan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dalam menghadapi dinamika bermasyarakat berbangsa dan bernegara ditengah-tengah tata pergaulan global yang semakin kompetitif sesungguhnya keanekaragaman merupakan khasanah kekayaan yang secara kodrati dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Namun kita harus berhati-hati mengelola keanekaragaman tersebut sehingga dapat menjadi sumber daya untuk kejayaan bangsa dan bukan sebaliknya justru

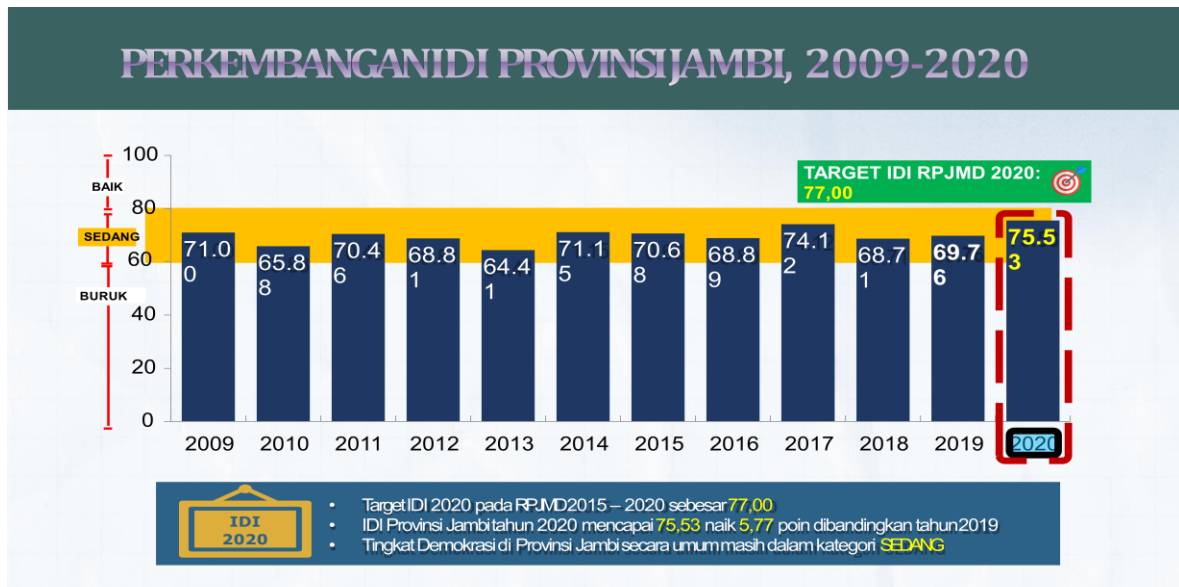
akan mengakibatkan gejolak yang mengancam integritas bangsa. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan antar ras, suku, etnis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diadakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jambi sebagai salah satu wadah untuk menumbuh kembangkan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan peserta FPK Kabupaten/Kota dan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Melalui Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi FPK dalam meningkatkan cinta tanah air dan kebangsaan. Melaui forum ini diharapkan dapat menyamakan langkah persepsi dan pola pikir, pola sikap, pola tindak terhadap setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Guna menciptakan situasi aman, kondusif, tertib menuju Jambi MANTAP 2021-2026 dalam membangun Provinsi Jambi kedepan
- Pelaksanaan program pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Kesadaran Bela Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara bagi generasi muda sehingga tumbuh rasa cinta tanah air dan patriotisme. Kegiatan dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2021 dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Bela Negara yang dilaksanakan Kabupaten Batanghari di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan peserta 100 (seratus) peserta yang terdiri dari pelajar.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara, serta Pelaksanaan Puncak Hari Bela Negara pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021.

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Di Daerah dengan output, Tersusunnya Program Kerja Tim untuk meningkatkan Nilai Capaian IDI di Provinsi Jambi, sesuai dengan tabel grafik dibawah ini :

Gambar 1.6
Perkembangan IDI Provinsi Jambi 2009-2020



Sumber : Data BPS Provinsi Jambi Tahun 2021

Dengan hal tersebut maka dilaksanakan/disosialisasikan melalui kegiatan rakorda IDI pada tanggal 4 November 2021 yang diikuti oleh 100 orang peserta terdiri dari Tim Pokja IDI Provinsi Jambi, Bappeda Kabupaten/Kota, PolPP Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kab/Kota, Kesbangpol Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Golden Harvest Kota Jambi dengan narasumber Ketua Komisi 1, Bappenas RI dan BPS Provinsi Jambi. Selanjutnya dilaksanakan rapat internal Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dalam rangka Menyusun Strategi Kerja Untuk Meningkatkan Nilai capaian IDI Provinsi Jambi dengan jumlah peserta yang terdiri dari TNI, Polri, Akademisi, Aktivis/Mahasiswa, Media, Tokoh Agama, Intansi Vertikal, serta Para utusan OPD Pemerintah Provinsi Jambi terkait yang terdapat dalam SK Gubernur. Rapat Internal Kelompok Kerja IDI Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 di BPS Provinsi Jambi.

ii. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 sebesar Rp.2.494.988.000,-. Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 99,85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.491.192.044,-. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu terwujudnya situasi politik daerah yang kodusif. Pelaksanaan kegiatan politik diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan politik dikalangan masyarakat, partai politik, ormas, mahasiswa/i, dan pelajar terutama pemilih pemula dan aparatur guna terselenggaranya politik yang santun, sehat dan berkualitas, rapat koordinasi dan pemantauan situasi perkembangan politik serta kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-undang Politik.
 - a. Sosialisasi Undang-undang Politik Tanggal 17 Februari 2021.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik dilaksanakan di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi dengan peserta 40 orang terdiri dari Pelajar dan Mahasiswa dengan Tema "Etika Budaya Politik di Zaman Milenial" Narasumber dalam kegiatan yaitu dari Kaban Kesbangpol, Anggota DPR dan Akademisi. Acara dibuka oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi.
 - b. Sosialisasi Undang-undang politik Tanggal 24 Februari 2021.
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik dilaksanakan di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi dengan peserta 30 orang dari Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dalam pemilu periode 2019-2024, Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dari Kaban Kesbangpol, Inspektorat, dan Kabid Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan. Acara dibuka oleh Kaban

Kesbangpol Provinsi Jambi. Tema kegiatan ini "Etika Budaya Politik di Zaman Milenial".

- c. Sosialisasi Undang-undang politik Tanggal 8 April 2021. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik dilaksanakan di Aula Kesbangpol Batanghari dengan peserta 40 orang terdiri dari pelajar dan Mahasiswa, siswa terdiri dari siswa SMK 1 Batanghari, SMA 6 Batanghari, SMA 7 Batanghari dan SMA 10 Batanghari. Narasumber terdiri dari Kaban Kesbangpol, Ketua KPU dan Akademisi. Tema kegiatan ini "Etika Budaya Politik di Zaman Milenial". Acara di buka oleh Kaban Kesbangpol Batanghari.
- d. Sosialisasi Undang-undang politik Tanggal 5 Juni 2021. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tebo dengan peserta 40 orang terdiri dari pelajar dan Mahasiswa. Narasumber terdiri dari Organisasi perempuan, Komisi I DPRD Kabupaten Tebo dan Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi. Acara dibuka oleh Bupati Tebo Sukandar, ia menghimbau agar para pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik karena dapat menambah ilmu politik bagi pelajar dan mahasiswa. Tema kegiatan ini "Etika Budaya Politik di Zaman Milenial".
- e. Sosialisasi Undang-undang politik Tanggal 4 November 2021
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-undang Politik dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Kerinci dengan peserta 30 orang terdiri dari pelajar dan Mahasiswa. Acara dibuka oleh Bupati Kerinci Adi Rozal, ia sangat antusias dengan adanya acara ini supaya mahasiswa dan pelajar mengetahui cara berdemokrasi yang baik. Narasumber dari kegiatan ini yaitu Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Ketua KPU, Akademisi.

2. Rapat Internal

Rapat internal dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi dengan peserta 33 Orang yaitu Anggota Tim Pemantauan. Acara dibuka oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi.

3. Rapat Tim Verifikasi.

Rapat Tim Verifikasi dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 9 Desember 2021 dengan jumlah peserta 30 peserta yaitu Tim Verifikasi. Rapat membahas tentang verifikasi Proposal Partai Politik yang akan mencairkan dana Bantuan Keuangan Parpol dan membahas masalah Partai Beringin Karya (Berkarya) yang masih dalam konflik yaitu adanya dualisme dalam kepengurusannya.

4. Rapat Koordinasi Bidang Politik

Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan Tanggal 8 Desember 2021 di Aula Kesbangpol dengan jumlah peserta 42 orang terdiri dari Sekda Kabupaten/kota, Kepala Kesbangpol Kabupaten/kota dan Kepala Bakeuda Kabupaten/kota. Acara di buka oleh Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Drs. H. Apani Saharudin.

iii. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 2 sub kegiatan : Pembinaan atau pengembangan SDM Pengurus Ormas

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Utomo, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Ormas lainnya yang didirikan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang agat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintah memfasilitasi, memberdayakan serta meningkatkan sarana koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan.

2. Tujuan

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ormas dan LSM, bertujuan:

1. Untuk memonitor dan mengevaluasi keberadaan serta permasalahan-permasalahan Organisasi Kemasyarakatan di Kab/Kota dalam Provinsi Jambi;
2. Adanya pembaharuan database berkaitan dengan perubahan kepengurusan dan jumlah keberadaan Organisasi Kemasyarakatan secara berkesinambungan;
3. Terjalinnya kemitraan antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
4. Meningkatkan Partisipasi dan peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan dalam Negeri;
5. Terkelolanya hak dan kewajiban warga Negara dalam berserikat dan berkumpul;
6. Terciptanya kesadaran kolektif warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memantapkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
7. Menjadi sarana konsolidasi antar unit kerja pemerintah nasional dan daerah dalam penanganan masalah keormasan;
8. Menyamakan persepsi dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Organisasi Kemasyarakatan;

9. Memperoleh data dan informasi mengenai aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi;

Sasaran

Penanganan Organisasi Kemasyarakatan yang mendaftar pada Pemerintah (Badan Kesbangpol) Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan peran untuk memelihara Kesatuan Bangsa dalam bidang ideologi, Politik Ekonomi dan Sosial Budaya. Capaian keluaran yaitu tersusunnya Rekomendasi dan Dokumen Pelporan dalam rangka Pemantauan, evaluasi, Fasilitasi dan Koordinasi Ormas

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Data Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Provinsi Jambi tahun 2021

No	Provinsi/Kab/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Ket
1	Provinsi Jambi	308	275	583	

Daftar Organisasi Kemasyarakatan di Prov Jambi tahun 2021

No	Provinsi/Kab/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Ket
1	Provinsi Jambi	185	295	480	
2	Kota Jambi	46		46	
3	Kota Sungai Penuh	25		25	
4	Kab Kerinci	57		57	
5	Kab Merangin	57		57	
6	Kab Sarolangun	99		99	
7	Kab Bungo	18		18	
8	Kab Tebo	16		16	
9	Kab Batanghari	132		132	
10	Kab Muaro Jambi	20		20	
11	Kab Tanjab Barat	69		69	
12	Kab Tanjab Timur	82		82	
	Jumlah	802	299	1.101	

Pada tahun 2021 pengambilan syarat pendaftaran lebih kurang 55 Ormas dan yang mengembalikan persyaratan juga berjumlah 55 Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan Pembinaan dalam Bentuk Sosialisasi.

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Ormas Pembinaan/ Pemberdayaan Ormas

Pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi/seminar/dialog dll, dimana tahun 2021 dilakukan 2 (dua) kali kegiatan di Provinsi Jambi dan 5 (lima) kali di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Dengan materi yang dipilih diantaranya tentang. Dengan tema :

1. "Peran dan Fungsi Ormas Dalam Pembangunan di Provinsi Jambi"
2. "Meningkatkan Kapasitas Ormas dan Evaluasi Kegiatan Ormas Tahun 2021.

Pemilihan materi ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tujuan dan fungsi ormas serta sinkronisasi visi dan misi Gubernur Jambi yaitu Jambi Mantap, (Maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan profesional).

Dalam kegiatan ini Badan Kesbangpol dapat melakukan selama 7 (tujuh) kali dan 2 (dua) kali di Provinsi dan di Kabupaten/ diantaranya :

a. Kabupaten Bungo

Dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Bungo dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang acaranya dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bungo oleh Bapak Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd yang didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan dihadiri oleh forum pimpinan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo bertempat di aula kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, yang dimotori oleh Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan peserta 110 (seratus sepuluh) orang dan 2 (dua) dari Ormas.

b. Kabupaten Tebo

Dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Tebo dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang acaranya

dibuka langsung oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Tebo, Kepala Bappeda Kabupaten Tebo. Bertempat di aula KPU Kabupaten Tebo. Dengan peserta 110 (seratus sepuluh)

c. Kabupaten Kerinci

Dari Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Provinsi Jambi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 yang acaranya dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbagpol Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Ketua Bappeda Kabupaten Kerinci, bertempat di aula Kampus II STIA/STIE Kabupaten Kerinci. Dengan peserta 110 (seratus sepuluh) orang.

d. Kabupaten Batanghari

Dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kabupaten Batanghari dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang acaranya dibuka langsung Bupati Batanghari, yang didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Kepala Bidang OPK dan LP Provinsi Jambi. Daerah Kabupaten Batanghari bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari. Dengan peserta 70 (tujuh puluh) orang

e. Kota Sungai Penuh

Dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2021 yang acaranya dibuka langsung oleh Walikota Sungai Penuh yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh. Dengan peserta 110 (seratus sepuluh) Orang.

iv. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini adalah termasuk Program baru di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi namun dalam pelaksanaan adalah merangkum beberapa kegiatan sebelumnya dengan nama "*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*" adapun kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 482.148.590,- dengan realisasi Rp. 477.250.200,- atau 98,98% dari kegiatan ini sesuai dengan perncanaan sudah dilakukan beberapa diantaranya :

a. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB

Forum ini sudah di fasilitasi dengan mengadakan Rakor yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2021 di Kota Jambi dengan peserta Fkub Se-provinsi Jambi dan Kementerian Agama dengan

Maksud dan Tujuan :

Menyampaikan Visi, misi dan persepsi dalam meningkatkan peran FKUB, Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan dewan penasehat FKUB untuk mengfunsikan FKUB dalam menciptakan kerukunan Intern dan unsure umat beragama di Provinsi Jambi, Mengkoordinasikan Kerjasama pemerintah dan FKUB dan Mengevaluasi Program kerja FKUB tahun 2021 dan menyusun Program kerja Tahun 2022.

Tujuan :

Dengan terbentuknya FKUB baik di Provinsi maupun Kabupten/kota dapat meningkatkan kerjasama Pemerintah dan FKUB serta memperoleh Informasi untuk penyelesaian masalah kerukunan umat beragama di provinsi Jambi serta mengevaluasi program kerja FKUB.

Narasumber :

- Sekretaris Daerah
- Hasan Basri Agus di wakilkkan Bapak Ir. Sarasadin
- Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi

Kesimpulan

b. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2021

Pencegahan Narkotika perlu peran Pemerintah daerah terutama untuk pembrantasan dan memfasilitasi berkaitan dengan penyebaran Narkoba di Daerah. Badan Kesbangpol sesuai dengan Permendagri diberi kewenangan berkaitan dengan sosialisasi tentang aturan dan resiko dari narkoba itu sendiri. Baru-baru ini Badan kesbangpol mengadakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di Kota Jambi (Aula Badan Kesbangpol Provinsi Jambi) dengan peserta Tokoh Masyarakat, Ormas, Parpol yang terdaftar di Kesbangpol :

Maksud dan Tujuan :

Maksud_:

Mengoptimalkan peran pemerintah Daerah (OPD) dalam pencegahan Narkotika serta memberi pemahaman tetang resiko Narkoba.

Tujuan :

Memberi pemahaman tetang resiko Narkoba bagi peserta.

Narasumber :

- Sekretaris Daerah diwakilan asisten Administrasi Pemerintahan
- Dir Narkoba Kapolda Jambi
- Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

Kesimpulan

Provinsi Jambi Tahun Pada 2017 menduduki peringkat 4 Penyalahgunaan Narkotika, dan sekarang jambi berkurang menjadi peringkat 26 dan akan terus bekerja keras untuk memberantas Penyalahgunaan Narkotika sehingga Provinsi dapat terbebas dari Penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Badan Kesbangpol yang menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021.

Sosialisasi ini dilaksanakan merupakan tindakan Moril untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Penyalahgunaan Narkotika

Agar Peserta Sosialisasi dapat menyampaikan ke Kesbangpol bagaimana cara Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Badan Kesbangpol sangat mengharapkan masukan-masukan untuk Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika.

Mudah-mudahan untuk Kegiatan Sosialisasi yang akan datang dapat terlaksanakan apa-apa yang di harapkan.

3. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Pelaksanaan Program ini memiliki sasaran yaitu Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dengan total dana dalam Program ini berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 1.264.859.980,- dengan di dukung Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan ini telah tercapai 97.03% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.227.327.220,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 1.264.859.980,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.227.327.220,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya Konflik di

Provinsi Jambi sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat, dengan kegiatan:

- a. Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Pelajar, Pemuda, Mahasiswa, Masyarakat dan pegiat media sosial dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang terdiri dari 4 (empat) kali pelaksana kegiatan sosialisasi. Adapun realisasi kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing 99 % atau realisasi keuangan sebesar Rp 428.942.580,-

b. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial.

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Tahun 2015 (Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial) mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 639.871.000,- dan pada Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.413.72.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.345.976.000,- atau sebesar 83,62 % sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 95 %. Tahun 2017 pagu anggaran Rp.311.676.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Tahun 2018 pagu anggaran Rp.285.962.000,-.

Sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar Rp.285.866.500,- sebesar 99,97. Tahun 2019 pagu anggaran Rp.792.762.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar Rp.744.212.000,- sebesar 93.88%. Untuk tahun 2020 alokasi anggaran Timdu Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp.118.446.000,- realisasi keuangan Rp.117.908.300,- atau 99,55 %). Sedangkan Untuk tahun 2021 alokasi anggaran Timdu Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp.428.942.580,- realisasi keuangan Rp.428.942.580,- atau 100 %)

- Rapat Internal Timdu.

Kegiatan Rapat Internal Timdu Provinsi Jambi dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun yang membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan

informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah (Provinsi Jambi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Dengan jumlah peserta 80 dengan peserta yang terdiri dari Timdu Provinsi dan di ikut sertakan Kabupaten/Kota serta pihak yang berkonflik

- Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Se Provinsi Jambi.

Rapat ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan juga membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah (Provinsi Jambi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini. Dengan jumlah peserta 80 dengan peserta yang terdiri dari Timdu Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi.

c. Kegiatan Pemantauan Orang Asing.

Kegiatan Pemantauan Orang Asing, dengan output pemantauan kegiatan orang asing, TKA , peneliti asing, kunjungan / lalu lintas orang asing di daerah, outcome berupa konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota , impak lalu lintas dan adanya pemantauan situasi keamanan dan ketentraman kegiatan orang asing di 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi. Merumuskan solusi pemecahan masalah sebagai bahan untuk direkomendasikan kepada gubernur Jambi dalam pengambilan kebijakan/keputusan dalam hal penanganan orang Asing. Diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait diantaranya Dinas Sosial dan tenaga Kerja dan TIM PORA (Tim Pemantauan Orang Asing).

Pekerja asing diwilayah Provinsi Jambi bekerja pada di 11 Kab/Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 49 dan 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing di daerah dengan di

laksanakan sebanyak 2 (kali) dalam 1 Tahun. Adapun realisasi kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing 99 % atau realisasi keuangan sebesar Rp 64.266.000,-.

d. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda).

Kegiatan ini di bagi 2 (dua) kegiatan ada rapat khusus Fokopimda Provinsi dan Fokopimda Provinsi dan Gabungan Kabupaten/Kota

- Rapat Fokopimda Provinsi dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali dalam 1 Tahun dengan peserta 40 Orang dengan peserta unsur masyarakat sesuai dengan Tema dan agenda Pembahasan.
- Rapat Fokopimda Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Rakorda) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 Tahun dengan peserta 120 Orang dengan peserta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaen Kota dan Para Perangkat daerah terkait.

Adapun penyediaan Anggaran ini Rp. 764.860.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 727.780.000,- atau realisasi keuangan sebesar 95,15 %.

Kesimpulan dan Kendala :

- Dengan kondisi Pandemi ruang gerak terbatas dan minimnya koordinasi serta dukungan anggaran belum maksimal
- Secara umum kegiatan bidang penganan Konflik sudah telaksana sesuai rencana.

3.9 Laporan Realisasi Anggaran Per-Program Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.10
Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2014

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.303.625.700,-	1.248.479.709,-	95,77 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1.296.863.950,-	1.257.691.851,-	96,98 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	26.800.000,-	26.400.000,-	98,51 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	40.000.000,-	39.850.000,-	99,63 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	194.680.700,-	194.276.200,-	99,79 %
Jumlah		2.861.970.350,-	2.766.697.760,-	96,67 %

Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2014

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	1.084.719.000,-	1.079.654.000,-	99,53 %
2.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak	903.129.900,-	897.874.700,-	99,42 %

	Kriminal.			
3.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	373.227.000,-	364.509.900,-	97,66 %
4.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	987.449.000,-	966.498.400,-	97,88 %
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	527.574.000,-	515.877.950,-	97,78 %
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	926.083.550,-	856.850.800,-	92,52 %
7.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.016.848.200,-	982.488.500,-	96,62 %
Jumlah		5.819.030.650,-	5.663.754.250,-	97,33 %

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2015**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.365.710.450,-	1.328.786.192,-	97,94 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	558.800.000,-	539.195.376,-	96,49%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	28.000.000,-	25.200.000,-	90,00 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	40.000.000,-	39.950.000,-	99,88%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	345.477.400,-	320.489.180,-	92,77%
Jumlah		2.337.987.850,-	2.253.620.748,-	95,41 %

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2015**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	639.871.000,-	622.981.300,-	97,36 %
2.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	894.821.000,-	795.996.749,-	88,96 %
3.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	343.697.150,-	305.955.350,-	89,02%
4.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	818.457.000,-	804.823.171,-	98,33%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	305.707.200,-	280.784.300,-	91,85 %
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	803.635.700,-	781.566.750,-	97,25 %
7.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	665.194.100,-	639.085.200,-	96,07 %
Jumlah		4.471.383.150,-	4.231.192.820,-	94,12%

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2016**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.146.853.900,-	1.132.717.454,-	98,77
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	538.220.000,-	529.348.176,-	98,35
3.	Program Peningkatan	32.000.000,-	29.200.000,-	91,25

	Disiplin Aparatur.			
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	18.182.000,-	18.182.000,-	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	338.773.930,-	331.530.302	97,86
Jumlah		2.074.029.830,-	2.040.977.932	97,25

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2016**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.229.488.670,-	1.164.602.304,-	94,72
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.175.616.200,-	1.169.953.647,-	99,52
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	731.606.200,-	631.173.700,-	86,27
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	2.321.596.100,-	1.104.313.353,-	47,57
Jumlah		5.458.307.170,-	4.070.043.004	82,02

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2017**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.037.968.749,-	1.001.678.295,-	96,50
2.	Program Peningkatan Sarana	496.360.000,-	477.661.737,-	96,23

	dan Prasarana Aparatur.			
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	43.200.000,-	43.200.000,-	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	23.000.000,-	22.298.500,-	96,95
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	337.624.291,-	329.844.000,-	97,70

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2017**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.198.736.570,-	1.171.322.967,-	97,71
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.122.351.200,-	1.119.220.385,-	99,72
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	753.856.200,-	737.570.232,-	97,84
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	2.052.205.100,-	2.046.197.882,-	99,71
	Jumlah	5.127.149.070,-	5.074.311.466	98,75

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2018**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	993.125.870,-	970.735.387,-	97,75
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	440.446.447,-	428.384.100,-	97,26
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	56.550.000,-	52.650.000,-	93,10

4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	23.000.000,-	23.000.000,-	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	316.886.000,-	314.989.148,-	99,40
Jumlah		1.830.008.317,-	1.789.758.635	97,50

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2018**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	1.096.766.613,-	1.082.189.985,-	98,67
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.000.308.200,-	994.882.425,-	99,46
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	920.945.580,-	900.574.922,-	97,79
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.806.971.290,-	1.782.093.800,-	98,62
Jumlah		4.824.991.683,-	4.759.741.132	98,64

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2019**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	971.243.000,-	932.376.105,-	96.00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	1.026.497.000,-	1.005.681.700,-	97.97
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	48.750.000,-	48.750.000,-	100
4.	Program Peningkatan	12.500.000,-	3.500.000,-	28.00

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	280.000.000,-	275.831.048,-	98.50
Jumlah		2.338.990.000,-	2.266.138.853,-	96.88

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2019**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	982.368.000,-	902.119.038,-	91.83
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.850.259.000,-	1.774.638.618,-	95.91
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	865.803.000,-	848.290.445,-	97.98
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.635.880.000,-	1.621.974.878,-	99.15
Jumlah		5.334.310.000,-	5.147.022.979,-	96.48

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Administrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	828.175.618,-	752.571.888,-	90.87%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	461.849.904,-	452.207.450,-	97.91
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	48.750.000,-	48.750.000,-	100
4.	Program Peningkatan	-	-	-

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	135.300.000,-	133.410.400,-	98.60
Jumlah		1.474.075.522,-	2.266.138.853,-	96.88

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	982.368.000,-	902.119.038,-	91.83
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	1.850.259.000,-	1.774.638.618,-	95.91
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	865.803.000,-	848.290.445,-	97.98
4.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	1.635.880.000,-	1.621.974.878,-	99.15
	Jumlah	5.334.310.000,-	5.147.022.979,-	96.48

3.10 Rencana Program dan Pendanaan Tahun Anggaran 2021

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 mengacu pada RKA SIPD Kemendagri Tahun 2021, adapun program/kegiatan dan Rencanan Anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran per Program
Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jambi Tahun 2021**

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.150.601.066,-	90.31 %	-
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	490.973.385,-	99.59 %	-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.494.988.000,-	99.85 %	-
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	597.524.320,-	99.78 %	-
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	482.148.590,-	98.98 %	-
6.	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.264.859.980,-	97.03 %	-
Jumlah		14.481.095.341,-	93.53 %	-

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam memperhatikan garis umum kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tentang Tupoksi uraian tugas Badan Kesatuan dan Politik sesuai dengan visi dan misi melakukan berbagai program dalam upaya menetapkan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat untuk menuju Jambi TUNTAS.

Kegiatan Badan Kesatuan dan Politik pada Tahun 2020 telah melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, partai politik, Pemantauan pelaksanaan Pemilu, mengembangkan pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengadakan pendeteksian dini dan memfasilitasi penanganan konflik sosial yang ada di masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik baik antara masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi. Dengan demikian capaian Program/Kegiatan tersebut pada Tahun 2020 meliputi : *Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan* terealisasi 97,77% atau Rp.674.542.031,- dari anggaran Rp.689.946.550,-, *Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan* sebesar Rp.418.246.100,- terealisasi Rp.414.689.882,- atau 99,15%, *Program Pendidikan Politik Masyarakat* dengan capaian Rp.414.676.436,- atau 99,84 % dari anggaran Rp.415.358.606,-, *Program Perwujudan Demokrasi yang makin kokoh* terealisasi Rp.1.331.742.255,- (98,82 %) dari anggaran Rp.1.347.591.155,-. Secara keseluruhan Program/Kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2020 telah tercapai sebesar Rp. 4.222.590.342,00(97,18 %) dari anggaran Rp.4.345.217.933,-.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri (TIMDU);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan;

- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, serta bela negara.

Demikian Laporan kinerja (LKj) Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2020, pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan dan Politik dimasa yang akan datang.

4.2 REKOMENDASI

1. Capaian perencanaan pembangunan daerah, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BanKesbangpol) tahun 2021 adalah sebesar 93.53%, dari analisis capaian tersebut maka direkomendasikan diperlukan data yang komprehensif dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah serta lebih responsif terhadap perubahan regulasi terkait dengan perencanaan perangkat daerah.
2. Untuk aparatur perlu adanya persamaan persepsi serta peningkatan kualitas aparatur perencanaan.

Jambi, Januari 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI

H. MUKTI, SE, ME

Pembina Tk I

Nip. 19701112 199903 1 002